

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kota Tegal

Halaman 28

Komisi I DPRD Desak Penyerahan Aset SMK SMA Negeri ke Pemprov

Pemecahan Lahan Sekolah Harus Dihentikan

TEGAL - Komisi I DPRD mendesak Pemkot Tegal agar secepatnya menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan SMK/SMA negeri kepada Pemprov Jateng. Sebab, hingga kini proses penyerahan aset belum dilakukan, meski pengelolaan sekolah sudah ditangani Pemprov. Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPRD, Sisdiono Ahmad, kemarin.

"Sesuai ketentuan, seharusnya penyerahan aset sekolah dilakukan maksimal 1 Oktober 2016. Namun, dalam kenyataannya hingga kini belum dilakukan oleh Pemkot Tegal," ungkapnya.

Menurut dia, akibat belum adanya penyerahan aset, SMK/SMA negeri di Kota Tegal tidak bisa mendapatkan bantuan untuk pembangunan. Hal itu dinilai menghambat proses pengembangan sarana prasarana serta mutu dan kualitas pendidikan.

"Untuk menyikapi persoalan ini kami telah menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait," katanya.

Sisdiono mengemukakan, sejumlah instansi yang hadir antara lain, dari Badan Keuangan Daerah (Bakuda), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kepala SMA 1, dan SMP 1 Kota Tegal.

Tunggu Proses

Dalam kesempatan itu, terungkap untuk proses penyerahan aset SMK/SMA negeri belum dilakukan Pemkot Tegal ke Pemprov Jateng karena masih menunggu proses penyepitan / pemecahan bidang tanah di SMA 2, SMA 4, dan SDLB. Hal itu dilakukan agar sebagian lahan bisa menjadi milik Pemkot Tegal. "Proses penyepitan untuk pembuatan sertifikat masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kami meminta agar proses penyepitan untuk dihentikan karena nantinya lahan sekolah tersebut juga akan digunakan oleh warga Kota Tegal," tegasnya.

Dia menambahkan, penyerahan seluruh aset SMA/SMK negeri di Kota Tegal harus secepatnya dilakukan agar persoalan sengketa lahan antara SMA 1 dengan PT KAI bisa segera ada solusi terbaik. Pemkot juga harus serius dalam upaya menangani masalah tersebut. Sebab berdasarkan sejarahnya lahan beberapa sekolah SMK/SMA dulunya merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat ke Pemkot Tegal.

Terkait hal itu, Ketua DPRD, Edy Suripno mengatakan, untuk menindaklanjuti adanya keterlambatan penyerahan aset SMK/SMA negeri dan penyepitan lahan, DPRD akan memanggil BPN dan instansi terkait. "Kami akan meminta penjelasan secara rinci tentang masalah ini. Sebab, penyepitan lahan sekolah tidak bisa secara ser-tamerta dibenarkan," tegasnya.(H17-50)